

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki fokus untuk menurunkan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan masalah utama pada negara berkembang, meskipun beberapa negara berkembang telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional. Pembangunan sendiri memiliki tujuan utama yaitu menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan pendapatan dan pertumbuhan yang setinggi-tingginya.

Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar sebagaimana anggota masyarakat lain umumnya. Kemiskinan adalah sesuatu yang berhubungan dengan keadaan fisik yang dicirikan oleh ketidakcukupan dalam arti untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk nutrisi, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Kemiskinan mempunyai beragam manifestasi kelaparan seperti buta huruf, miskin kesehatan, pakaian dan perumahan di bawah standar, rentan terhadap kejadian-kejadian dan kondisi degradasi lingkungan dan keamanan (Wahyuni, 2012).

Masalah kemiskinan bersifat kompleks dan juga multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kemiskinan yang terus menjadi masalah fenomenal di seluruh belahan dunia, karena sifatnya yang multidimensional oleh karena itu kemiskinan juga memerlukan solusi yang

multidimensional pula. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Bahkan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting SDGs (Sustainable Development Goals) yang menggantikan MDGs (Millennium Development Goals) di akhir 2015.

Faktor pertama yang mempengaruhi persentase kemiskinan adalah jumlah penduduk yang besar apabila diikuti dengan kualitas yang memadai merupakan modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas rendah justru akan menjadi beban pembangunan. Mereka tidak mempunyai lahan atau alat produksi sendiri biasanya merupakan korban pertama dari langkah-langkah penghematan anggaran pemerintah (Rachmawati, 2021). Oleh karena itu diperlukan suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga bagus digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat ketimpangan ekonomi antar daerah.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan kerja yang kurang, kualitas sumberdaya alam masih rendah, penggunaan teknologi masih kurang, etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah, kultur/budaya (tradisi), dan politik yang belum stabil (Annur, 2013).

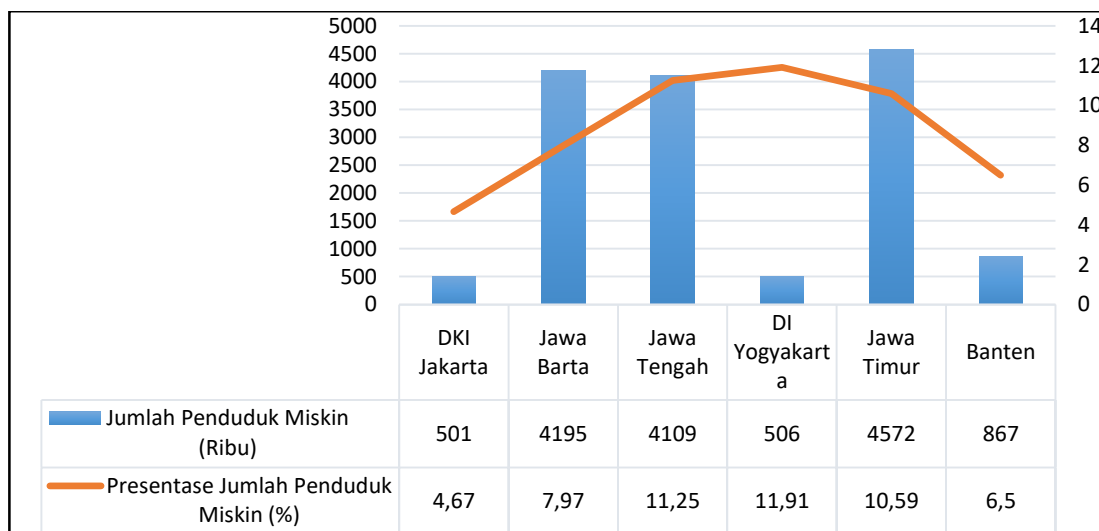
Di setiap wilayah Indonesia memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat kemiskinan tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan. Salah satu wilayah di Indonesia yang juga sedang melakukan pengentasan kemiskinan yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa

Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibu kota Jawa Timur ialah kota Surabaya. Jumlah penduduk sebanyak 40.665.696 jiwa (2021) dan kepadatan penduduk 851 jiwa/km². Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 2 bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur mencakup 90 persen dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10 persen. Luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang mencapai 47.799,75 km² terbagi menjadi 38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota (Azizah & Kusuma, 2018). Dalam pertumbuhan ekonominya Jawa Timur secara nasional memberikan kontribusi sebesar 14,44 persen yang menempati posisi terbesar kedua setelah DKI Jakarta yang memberikan kontribusi sebesar 17,23 persen.

Periode pembangunan saat ini, masih terdapat pembangunan yang masih belum merata ke semua wilayah. Berdasarkan peraturan peresiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 pembangunan daerah tertinggal telah menjadi salah satu prioritas Nasional. Hal tersebut memiliki tujuan untuk pemerataan pembangunan sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur memiliki keunikan dimana wilayahnya berada di Pulau Jawa dan sebagian yang lain berada di Pulau Madura serta kepulauan kecil lainnya. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pengambilan keputusan terkait strategi dan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan wilayahnya.

Kemiskinan menjadi masalah serius yang harus dihadapi Indonesia, khususnya Jawa Timur. Pasalnya, BPS Jawa Timur (2019) menjelaskan bahwa Jawa

Timur menempati peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia, dimana tahun 2021 menyentuh angka 4,05 juta jiwa. Tingginya angka kemiskinan inilah yang menempatkan permasalahan kemiskinan menjadi salah satu prioritas dalam setiap pembangunan. Walaupun data terbaru menyatakan bahwa di Jawa Timur telah terjadi penurunan persentase jumlah penduduk miskin, namun belum berarti Jawa Timur mengalami perbaikan tingkat kesejahteraan.



Sumber : BPS Indonesia 2021

Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021

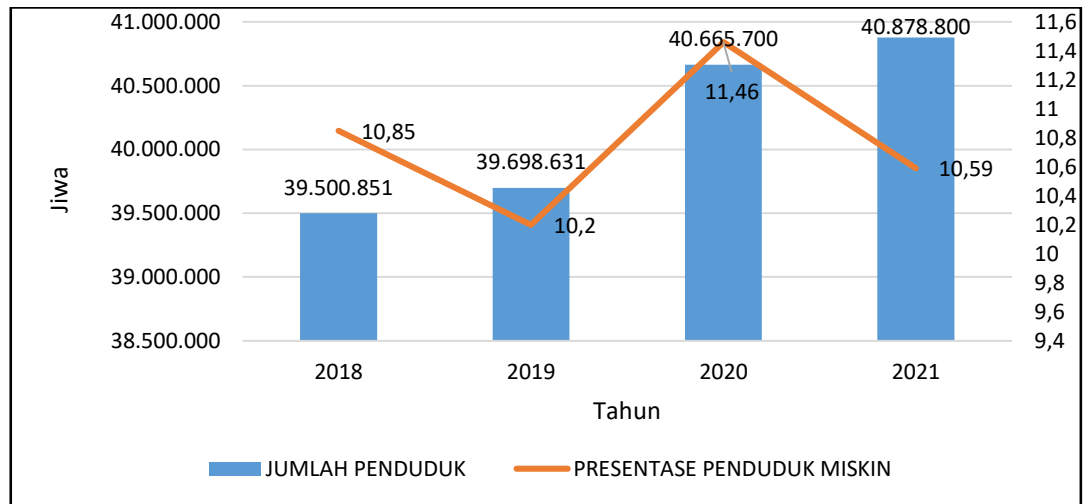
Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa Jumlah Penduduk Miskin pada tahun 2021 tertinggi di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.572 jiwa dengan presentase 10,59 persen. Sedangkan Jumlah Penduduk Miskin terendah yang ada di pulau jawa yaitu terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 501 ribu jiwa. Kondisi kemiskinan untuk beberapa Provinsi di pulau jawa akan menjadi masalah serius yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat termasuk juga di Provinsi Jawa Timur. Dimana jumlah penduduk miskinnya tertinggi dibandingkan

dengan provinsi yang lain di Pulau Jawa. Peningkatan kemiskinan di Jawa Timur disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar, namun tidak diimbangi dengan pemerataan penduduk dan peningkatan kesempatan kerja (BPS Jawa Timur, 2021)

Menurut (Kuncoro, 1997) bahwa jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Siregar dan Wahyuniarti (2008) menyatakan bahwa apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Penduduk yang dimaksud yaitu mereka orang yang menetap dan bertempat tinggal di wilayah tertentu. bertambahnya jumlah penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja.

Hasil penelitian mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Sejumlah penelitian di beberapa wilayah (Azizah & Kusuma, 2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Penelitian (Damanik & Sidauruk, 2021) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, hasil penelitian oleh (Tiovanni, 2021) juga menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan adanya

pengaruh antara Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan, bahwa semakin tinggi Jumlah penduduk akan mempengaruhi peningkatan Kemiskinan.



Sumber : BPS Jawa Timur 2021

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk dan Presentase Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2018-2021

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah penduduk di Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Pada tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 39.500.851 jiwa dengan persentase penduduk miskin sebesar 10,85 persen. Jumlah penduduk yang meningkat akan menyebabkan kebutuhan sumber daya alam meningkat yang semakin lama akan semakin berkurang dan meningkatnya jumlah tanggungan anggota keluarga sehingga akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Namun, data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penduduk memiliki hubungan negatif dengan jumlah penduduk miskin, dalam data tersebut presentase jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021.

Berdasarkan gambar 1.2 dari Jawa Timur Dalam Angka BPS, Jumlah penduduk miskin mengalami fluktuasi namun terlihat bahwa pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan dengan angka jumlah penduduk yang bertambah. Hal ini menunjukkan pertentangan dari teori yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan penduduk akan menekan angka kemiskinan. Menurut Todaro 2000 dalam (Saputra, 2011) bahwa besarnya jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Hal itu dibuktikan dalam perhitungan indeks Foster Greer Thorbecke (FGT), yang mana apabila jumlah penduduk bertambah maka kemiskinan juga akan semakin meningkat. Dengan kata lain, bahwa semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk maka tingkat kemiskinan akan semakin meningkat dikarenakan bertambahnya jumlah tanggungan anggota keluarga.

Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Penduduk dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumber daya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan (Kuncoro, 2010).

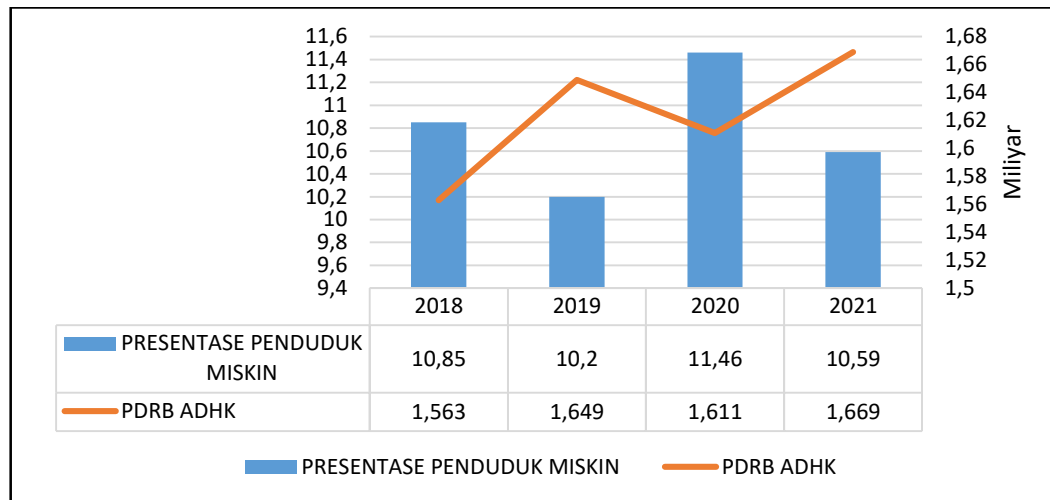
Selain jumlah penduduk, faktor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam pembangunan ekonomi. Tujuan utama dari pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan

tenaga kerja, dimana tenaga kerja merupakan bagian dari penduduk. Penyerapan tenaga kerja akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.

Menurut kunzet (Tambuan, 2003), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan ekonomi suatu daerah tingkat kemiskinan cenderung mengalami peningkatan dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin akan berangsur-angsur berkurang. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu ukuran untuk melihat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi tingkat kemiskinan. Semakin tinggi nilai PDRB pada suatu daerah akan menunjukkan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah (Tiovani, 2021). Salah satu yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat dan keberhasilan pembangunan disuatu daerah ditinjau dari sisi ekonominya, misalkan meningkatnya PDRB berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan disuatu wilayah (Sudiana, 2015).

Menurut Myanti (2013), PDRB merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dari tahun ke tahun, jadi semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah maka kemiskinan kecenderungan akan menurun. Menurut penelitian Siregar dan Dwi (2008) dari hasil penelitiannya tersebut menunjukan hasil negatif antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan jumlah penduduk miskin, artinya bahwa PDRB sebagai indicator pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian (Damanik & Sidauruk, 2021) juga menunjukkan variabel PDRB memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap variable kemiskinan di

provinsi Sumatera Utara. Sedangkan PDRB secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali (Iqraam & Sudibia, 2019).



Sumber : BPS Jawa Timur 2021

Gambar 1.3 Presentase Penduduk Miskin dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2021

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa PDRB ADHK pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. PDRB pada tahun 2018 sebesar Rp 1.563.441.82 dalam milyar dan mengalami peningkatan sebesar Rp 1.649.768.1 dalam Milyar pada tahun 2019. Peningkatan nilai PDRB pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada periode 2018 sampai dengan 2019. PDRB ADHK di Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2021 dan juga data jumlah penduduk miskin juga mengalami fluktuasi.

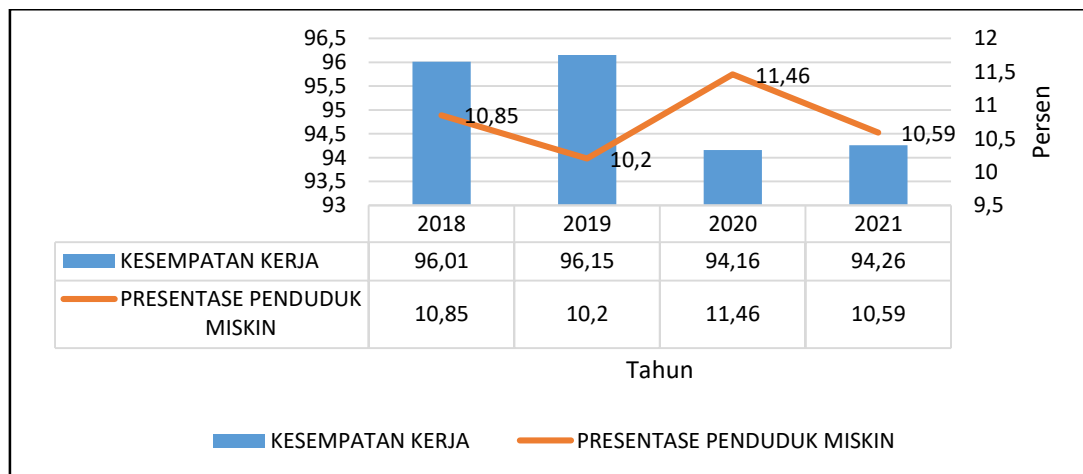
Namun peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap tahun belum tentu menjamin tingkat kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu menggambarkan penurunan kemiskinan secara

signifikan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar secara merata ke lapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya (Sukirno, 2000).

Selain jumlah penduduk dan juga PDRB faktor lain yang berkaitan dengan kemiskinan adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja dan kemiskinan mempunyai kaitan seperti yang di kemukakan oleh Sukirno (2004) di mana efek pengangguran yaitu mengurangi pendapatan masyarakat yang akhirnya seseorang tidak akan mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat akan menurun karena menganggur ini menimbulkan peluang mereka terkurung dalam kemiskinan. Prayoga et al. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja.

Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan (Sukirno, 2013). Kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong, sehingga semakin besar dan semakin luas kesempatan kerja tersedia maka semakin besar pengangguran dapat berkurang (Chandra et al., 2021), dengan berkurangnya pengangguran akan berdampak juga pada penurunan tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Hasil penelitian mengenai pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Putra & Arka, 2016). Kesempatan kerja secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali (Iqraam & Sudibia, 2019). Kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, dapat disimpulkan semakin besar kesempatan kerja akan semakin sedikit jumlah penduduk miskin (Sisca et al., 2013).

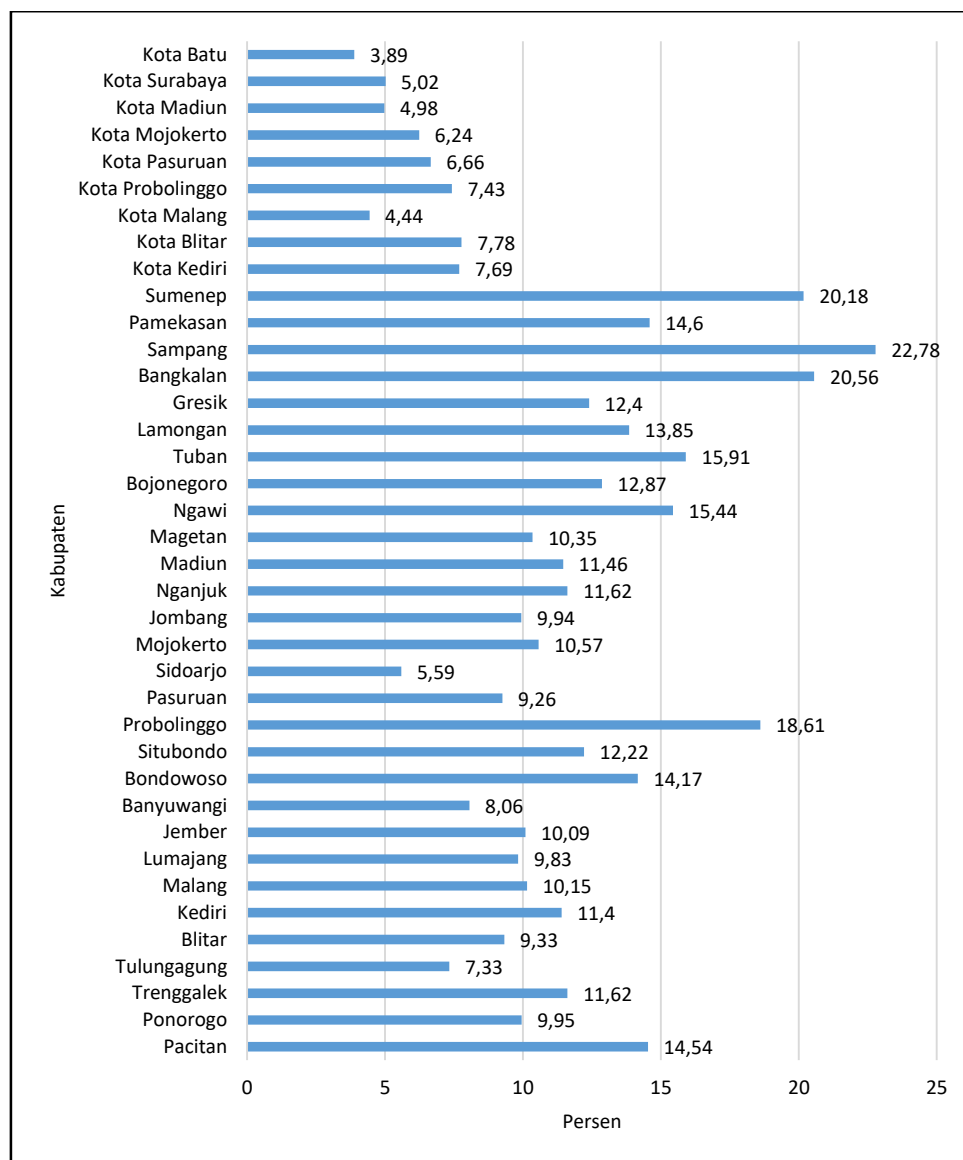


Sumber : BPS Jawa Timur 2021

Gambar 1.4 Presentase Kemiskinan dan Kesempatan Kerja di Jawa Timur Tahun 2018-2021

Gambar 1.4 menunjukkan angka kesempatan kerja pada tahun 2018 sebesar 96,1 persen dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,85 persen, angka kesempatan kerja mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 presentase kemiskinan mengalami penurunan sebesar 10,20 persen dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2020 sebesar 11,46 persen dan

mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 sebesar 10,59 persen. Namun pada data tersebut presentase kemiskinan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya dan kesempatan kerja terus mengalami peningkatan, sehingga tidak sesuai teori yang menyatakan bahwa ketika kesempatan kerja mengalami peningkatan akan mempengaruhi turunnya tingkat kemiskinan. Dalam mengukur jumlah tingkat kemiskinan di provinsi dapat dilihat dari total presentase di Kabupaten/kota.



Sumber : BPS Jawa Timur 2021

Gambar 1.5
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur
2021

Gambar 1.5 diatas menunjukkan persentase penduduk miskin menurut kabupaten/Kota pada tahun 2021. Persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2021 pada Kabupaten Sampang dengan angka persentase kemiskinan sebesar 22.78 persen, dan Lamongan merupakan kabupaten yang memiliki peringkat ke 10 persentase penduduk miskin dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur menandakan masih ada kabupaten atau kota di Jawa Timur yang masih tertinggal. Hasil usaha pemerintah yang belum merata dalam mengatasi masalah kemiskinan menjadi penyebab angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur masih tinggi. Padahal dapat diketahui jika dampak dari kemiskinan sangat buruk bagi perekonomian suatu daerah, termasuk Provinsi Jawa Timur (Ristika et al., 2021).

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa nilai PDRB mengalami peningkatan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Namun Presentase penduduk miskin pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dari 10,20 persen menjadi 11,46, sedangkan angka kesempatan kerja mengalami penurunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan tingkat kemiskinan yang mengalami fluktuasi pada tahun 2019 sebesar 10.20 persen ke tahun 2021 sebesar 11,46 persen. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan bahwa Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan, akan tetapi tidak sesuai kenyataan untuk tiap tahunnya dan angka kesempatan kerja menunjukkan probabilitas apakah seseorang tergolong miskin atau tidak miskin. Sehingga, menimbulkan pertanyaan

bagaimana pengaruh PDRB dan Kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dan pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, Kesempatan kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana Pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana Kesempatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan

Berdasarkan Rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Kesempatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi, informasi dan pedoman bagi pengambil kebijakan serta peneliti lainnya yang berminat dibidang yang sama.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. sebagai tambahan kajian empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan
2. sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pengentasan kemiskinan.
2. Bagi Swasta, penelitian ini diharapkan dapat informasi dan data mengenai pengaruh jumlah penduduk, PDRB dan Kesempatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB dan Kesempatan Kerja terhadap tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.